



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya-upaya Diplomasi Publik Australia melalui Koala**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Alifah Budhi Nurani

2016330076

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya-upaya Diplomasi Publik Australia melalui Koala**

Skripsi

Oleh

Alifah Budhi Nurani

2016330076

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Alifah Budhi Nurani  
Nomor Pokok : 2016330076  
Judul : Upaya-upaya Diplomasi Publik Australia melalui Koala

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada  
Rabu, 15 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

**Ketua sidang merangkap anggota**

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

:   
\_\_\_\_\_

Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., MA

:   
\_\_\_\_\_

Anggota

Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifah Budhi Nurani  
NPM : 2016330076  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Upaya-upaya Diplomasi Publik Australia melalui Koala

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 29 Juni 2020



Alifah Budhi Nurani

## ABSTRAK

Nama : Alifah Budhi Nurani

NPM : 2016330076

Judul Skripsi : Upaya-upaya Diplomasi Publik Australia melalui Koala

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya diplomasi publik Australia melalui Diplomasi Koala. Peminjaman koala merupakan salah satu agenda baru dalam diplomasi Australia, dimana telah mulai diresmikan sebagai salah satu bentuk *soft power* dalam hubungan diplomatik. Praktik diplomasi yang pada awalnya bersifat kaku dan konvensional, berubah setelah adanya istilah '*old and new diplomacy*', diplomasi tidak lagi berpusat pada kepala negara, tetapi mulai adanya dominasi dari penggunaan instrumen lainnya. Australia berusaha menggunakan koala, satwa yang menjadi lambang nasional sebagai bentuk dari *soft power* untuk melaksanakan diplomasi publiknya kepada mitra-mitra penting Australia, juga sebagai bentuk dari *new diplomacy*. Untuk menjawab pertanyaan penelitian "**Bagaimana Upaya Australia Melalui Diplomasi Koala untuk Membantu Mewujudkan Kepentingan Nasional Australia?**", penulis menggunakan teori diplomasi publik dari Alan K. Henrikson dan N.J. Cull, serta konsep *soft power* dari Joseph Nye. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, diplomasi koala yang dilakukan Australia merupakan upaya dari tercapainya *enlargement* dan *consolidation*, yang merupakan tujuan dari diplomasi publik tersendiri. Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura merupakan negara sekutu yang penting bagi Australia untuk tetap menjaga serta mengupayakan hubungan baik untuk jangka yang panjang. Upaya ini dilakukan demi membantu memenuhi kepentingan nasional Australia yang berusaha dicapai melalui diplomasi publik.

Kata Kunci: Australia, Diplomasi, Diplomasi Publik, Diplomasi Koala, Hubungan Diplomatik.

## ABSTRACT

Name : Alifah Budhi Nurani

NPM : 2016330076

Thesis Title : *Australia's Efforts in Public Diplomacy*

---

*This research is motivated by the existence of Australian public diplomacy through Koala Diplomacy. Lending koala is a new agenda in Australian diplomacy, which has been officially announced as a form of soft power in diplomatic relations. The practice of diplomacy, which was initially rigid and conventional, changes after the appearance of 'old and new diplomacy'. Diplomacy is no longer centered on the head of state, but begin to be dominated by other instruments. Australia use koalas, animals which are its national symbol, as a form of their soft power to carry out its public diplomacy to its important partners, as well as a form of new diplomacy. To answer the research question "**How is Australia's effort through Koala Diplomacy to achieve Its National Interest?**" author relies on public diplomacy theory from Alan K. Henrikson and N.J. Cull, and the concept of soft power by Joseph Nye. The author uses qualitative methods with data collection techniques through literature research. Based on the research results, Australia's koala diplomacy is an effort to achieve enlargement and consolidation, which are the goal of public diplomacy itself. The United States, Japan and Singapore are important allie countries for Australia to maintain and strive for good relations in the long term. This effort is carried out to meet Australia's national interests through public diplomacy.*

*Keywords: Australia, Diplomacy, Public Diplomacy, Koala Diplomacy, Diplomatic Relations.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa (YME) atas berkat dan karunia-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Australia dalam Misi Hubungan Diplomatik melalui Diplomasi Koala” ini. Adapun penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar akademik Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, atas segala keterbatasan, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun yang dapat membantu penelitian ini menjadi lebih baik.

Bandung, 29 Juni 2020

Alifah Budhi Nurani

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu selama menjalani studi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, hingga proses penelitian ini selesai. Secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah S.W.T. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis selama menjalankan studi hingga menyelesaikan penelitian ini,
2. Ibu Metti Muliawati, Ayah Budhianto dan Adik Baradja Budhi Badrika selaku keluarga yang selalu mendoakan penulis, serta memberikan dukungan moral dan materi. Terlepas dari apa yang terjadi, penulis mengucapkan terima kasih sudah membuat penulis tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat,
3. Mba Ratih Indraswari, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu menuntun dan memberikan arahan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Terima Kasih, Mba, sudah memberikan masukan yang sangat berguna bagi penulis,
4. Keluarga Tiga Dara, Tuff Fams, Garablack, dan Cukinyat selaku teman dekat yang penulis sayangi karena selalu siap sedia dalam membantu kesulitan penulis, serta memberi dukungan lahir dan batin, menemani hingga membuat penulis terhibur dengan canda gurau hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan akhir ini,



5. Muhammad Aldio, Azka Faradisa, Bella Rahmanita, Fatia Amalina, dan teman-teman paguyuban sunda yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan-keluhan perkuliahan, dan membuat penulis selalu tertawa dengan segala tingkah laku dari paguyuban,

6. Muhammad Kharisma, Mario Sumiharto Putra, Meitania Putri Maharani, Muhammad Farhan Kamaluddin, serta seluruh teman-teman kampus tiga yang sudah banyak membantu, menemani, serta jalan berdampingan dengan penulis melewati empat tahun perkuliahan ini.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan untuk segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima Kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungannya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR AKRONIM</b> .....	
<b>BAB 1 Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	10
1.2.2 Perumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.4. Kajian Pustaka .....	12
1.5. Kerangka Pemikiran .....	15
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.7. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB 2 Australia dan <i>Soft Power</i>-nya</b> .....	28
2.1 Australia sebagai negara Multikulturalisme .....	28
2.1.1 Profile Australia.....	28
2.1.2 Diplomasi berdasarkan Kebijakan Luar Negeri Australia .....	32
2.1.3 Diplomasi Publik dan <i>Soft Power</i> bagi Australia.....	35
2.2 Hubungan Australia dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. ....	38
2.2.1 Australia dan Amerika Serikat.....	38
2.2.2 Australia dan Jepang .....	40
2.2.3 Australia dan Singapura.....	43
<b>BAB 3</b> .....	46
<b>Analisis Diplomasi Koala Australia</b> .....	46
3.1. Diplomasi Koala Bagi Australia .....	46
3.2. Analisis Diplomasi Koala yang Dilakukan Australia Terhadap Studi Kasus .....	49

3.2.1. Analisis Upaya Diplomasi Koala Terhadap Amerika Serikat (1976).....	49
3.2.2. Analisis Upaya Diplomasi Koala Terhadap Jepang (1984 dan 2013) .....	52
3.2.3.	55
Analisis Upaya Diplomasi Koala Terhadap Singapura (2015) .....	55
<b>BAB 4 KESIMPULAN</b> .....	<b>60</b>

## DAFTAR AKRONIM

SPF	<i>South Pacific Forum</i>
ARF	<i>ASEAN Regional Forum</i>
ASEAN	<i>The Association of South East Asian Nations</i>
APEC	<i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
UN	<i>United Nations</i>
IMO	<i>International Maritime Organizations</i>
G20	<i>Group of Twenty</i>
DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade's</i>
G2G	<i>government to government</i>
G2P	<i>government to people</i>
KLN	Kebijakan Luar Negeri
IO	<i>International Organization</i>
NGO	<i>Non-governmental Organization</i>
MNC	<i>Multinational Corporation</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
ANZUS	<i>Australia, New Zealand, and United State of America</i>
SEATO	<i>The Southeast Asia Treaty Organization</i>
WTO	<i>The World Trade Organization</i>
NCP	<i>New Combo Plan</i>

AVID	<i>Australian Volunteers for International Development</i>
ANCP	<i>Australian NGO Cooperation Program</i>
DAP	<i>Direct Aid Program</i>
FCIs	<i>Foundation Councils and Institutes</i>
AUSFTA	<i>The Australia-United States Alliance and the Australia-US Free Trade Agreement</i>
JDSC	<i>Joint Declaration on Security Cooperation</i>
EAS	<i>the East Asia Summit</i>
AJF	The Australia-Japan Foundation
SAFTA	<i>The Singapore-Australia Free Trade Agreement</i>
CSP	<i>Comprehensive Strategic Partnership</i>

# BAB 1

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pasca Perang Dingin, isu-isu *low politics* menjadi fokus yang tak kalah penting di tiap-tiap negara, salah satunya adalah agenda budaya dalam berpolitik yang dianggap strategis untuk perkembangan dan pemenuhan kepentingan negara. Australia mengharuskan warga negaranya untuk menyadari lingkungan sekitarnya yang berbeda baik secara fisik maupun budaya karena adanya sebutan *misplaced continent*<sup>1</sup> atau benua salah letak, dimana dengan mayoritas masyarakat kulit putih, seharusnya Australia berada di kawasan Eropa, bukan di wilayah Pasifik Selatan. Berdasarkan hal tersebut, Australia harus menata kehidupan politik luar negerinya dengan mempertimbangkan *good neighbourhood* dengan negara-negara di sekitarnya.<sup>2</sup> Pasca Perang Dingin, isu kekuatan non-militer menjadi salah satu kepentingan utama yang dianggap perlu dimiliki dan juga dijunjung oleh suatu negara.

---

<sup>1</sup> Wawan Darmawan, "Arah Politik Australia Masa Kini", diakses pada tanggal 17 Agustus 2019, [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH/197101011999031WAWAN\\_DARMWAN/arah\\_politik\\_australia.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197101011999031WAWAN_DARMWAN/arah_politik_australia.pdf)

<sup>2</sup> James Cotton, "The Rhetoric of Australia's regional policy", diakses pada 17 Agustus 2019, <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p239321/pdf/ch037.pdf>

Australia menganggap budaya sebagai salah satu aspek yang sangat penting. Berdasarkan sejarahnya, penduduk Suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres merupakan masyarakat asli Australia, juga pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua di dunia.<sup>3</sup> Kekuatan dapat berbentuk apapun, termasuk budaya yang mendukung kepentingan negara. Aspek non-keamanan menjadi salah satu bentuk kekuatan ‘baru’ yang menjadi motif utama dalam pencapaian kepentingan secara khusus dalam era pasca Perang Dingin. Tertulis dalam kerangka hukum Australia bahwa seluruh penduduk Australia berhak untuk mengungkapkan kebudayaan ataupun kepercayaan, serta berhak untuk ambil bagian dengan bebas dalam kehidupan nasionalnya. Seluruh warga negara Australia diharapkan untuk menjunjung prinsip-prinsip serta nilai-nilai bersama yang menyokong cara hidup masyarakat, dengan kata lain demi melindungi warga negaranya dari diskriminasi ras. Kebijakan untuk bersikap toleran dan untuk melindungi kebudayaan yang berbeda tersebut disebut *multikulturalisme*.<sup>4</sup>

Kebijakan *multikulturalisme* dimaksudkan untuk menjaga kerukunan warga negara Australia. Dengan adanya kebijakan ini, semua warga negara Australia bebas untuk hidup di tempat yang dipilihnya dan bebas untuk mempertahankan kebudayaannya. Tiap-tiap warga negara dapat menggunakan dan mempelajari

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> “Australia: Negeri dengan Banyak Kebudayaan”, *Lembaga Australia-Indonesia*, diakses pada 17 Agustus 2019, <https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab09/index.html>

bahasanya, bebas untuk menjalankan agamanya. Australia menjunjung pandangan bahwa semua bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa adalah sama di mata hukum.

Prinsip *good neighbourhood* sudah direalisasikan dalam beberapa agenda, seperti pada saat Australia menjadi salah satu negara penggagas South Pacific Commission yang merupakan langkah awal terbentuknya South Pacific Forum (SPF). SPF merupakan forum dimana para pemimpin negara-negara di Pasifik bertemu dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di kawasan Pasifik. Forum SPF tersebut menghasilkan perjanjian South Pacific Nuclear Free Zone Treaty - The Treaty of Rarotonga yang merupakan penandatanganan perjanjian kawasan Pasifik akan terbebas dari tes-tes senjata nuklir.<sup>5</sup>

Australia merupakan salah satu negara yang turut membentuk ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1994. Hal ini juga menandakan kepentingan Australia dalam menata hubungan politik berpacu pada prinsip *good neighbourhood*. Asean Regional Forum memiliki 25 negara anggota yang menaruh perhatian bagi keamanan Asia Pasifik. Dari 25 anggota ARF, terdapat 10 negara anggota The Association of South East Asian Nations (ASEAN) yang adalah Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam.<sup>6</sup> Selain dengan negara-negara tetangga, Australia juga tergabung dalam organisasi

---

<sup>5</sup> “South Pacific Nuclear-Free Zone (SPNFZ) Treaty of Rarotonga”, *The Nuclear Threat Initiative*, diakses pada 18 Agustus 2019, <https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/south-pacific-nuclear-free-zone-spnfz-treaty-rarotonga/>

<sup>6</sup> “Australia, ASEAN, and the Asia Pacific”, *Australian Minister of Foreign Affairs and Trade*, diakses pada 18 Agustus 2019, [https://foreignminister.gov.au/speeches/2008/080718\\_lowy.html](https://foreignminister.gov.au/speeches/2008/080718_lowy.html)



internasional lainnya dengan Amerika Serikat dan Jepang dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), United Nations (UN), International Maritime Organizations (IMO), juga tergabung dalam forum Group of Twenty (G20).<sup>7</sup>

Australia memiliki budaya yang beragam berdasarkan warisan budaya asal dari warga negaranya. Karena itu, aspek kebudayaan kerap digunakan untuk mencapai kepentingannya, melalui opini serta *mindset* positif masyarakat internasional. Peminjaman koala merupakan salah satu agenda baru dalam diplomasi Australia, dimana telah mulai diresmikan sebagai salah satu *soft power* dalam diplomatik. Australia berkeinginan untuk menjadi negara yang hadir secara baik dalam masyarakat internasional, sebagai negara yang besar dan bertanggung jawab, serta mengusahakan situasi dunia yang damai. Keinginan-keinginan tersebut menjadi latar belakang aktivitas diplomasi Australia, salah satunya dengan memperkenalkan suatu kekuatan baru, pengaruh baru yang dapat digunakan demi mencapai kepentingannya yaitu salah satunya melalui diplomasi publik.

Sesuai dengan *The 2017 Foreign Policy White Paper committed the Australian Government*<sup>8</sup>, *soft power* bagi Australia merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan pemikiran orang lain melalui kekuatan ketertarikan dan gagasan. *Soft*

---

<sup>7</sup> “International Organisations”, *Australian Minister of Foreign Affairs and Trade*, diakses pada 19 Februari 2020, <https://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/Pages/international-organisations.aspx>

<sup>8</sup> “Soft Power Review”, *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*, diakses pada 23 Februari 2020, dikutip dari <https://dfat.gov.au/people-to-people/soft-power-review/Pages/soft-power-review.aspx>

*power* dapat mencakup lembaga pendidikan suatu negara, program bantuan, aset pariwisata serta kekuatan ekonominya, dan elemen identitas nasional lainnya seperti gaya hidup dan budaya. Diplomasi yang efektif mengharuskan Australia untuk mempertimbangkan cara-cara baru untuk terlibat dan pendekatan yang lebih sistematis diiringi dengan inovasi dari cara-cara diplomasi tradisional untuk memanfaatkan aset *soft power*. Upaya-upaya ini, termasuk diplomasi koala dilakukan untuk meningkatkan aset *soft power* Australia dengan lebih baik, mempromosikan kekayaan serta nilai-nilai karakteristik yang lembut dengan nilai-nilai Australia sebagai demokrasi yang terbuka, bebas, dan toleran<sup>9</sup>, demi membangun kemitraan yang efektif untuk memajukan keamanan dan kemakmuran Australia.<sup>10</sup>

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Hewan-hewan Australia telah lama dikirim secara internasional sebagai bentuk diplomasi. Sebelum menggunakan koala, platipus merupakan jenis hewan pertama yang mempunyai peran sebagai instrumen diplomasi Australia. Daya tarik masyarakat internasional serta minat ilmiah akan platipus yang tinggi menjadikan hewan tersebut merupakan suatu hadiah diplomatik yang sangat dihargai. Platipus pertama yang diberi

---

<sup>9</sup> Ivan Plis, "Australian Diplomats Have 600-Page Koala Manual", Daily Caller, diakses pada 13 Mei 2020, <https://dailycaller.com/2014/12/31/australian-diplomats-have-a-600-page-koala-manual/>

<sup>10</sup> *Ibid.*

nama Winston, meninggalkan Melbourne, Australia pada tahun 1943, berlayar menuju Inggris.<sup>11</sup>

Di era ini, koala semakin menarik perhatian masyarakat internasional atas perannya sebagai salah satu instrumen diplomasi yang dapat membantu Australia mencapai kepentingan politiknya. Pemerintah Australia memiliki peraturan yang ketat dan rinci soal diplomasi menggunakan *soft power*, termasuk buku birokrasi untuk membangun citra internasionalnya menggunakan koala yang berjumlah 600 halaman. Antusiasme mengenai diplomasi koala pada pertemuan G20 yang diadakan pada November 2014 di Brisbane menjadi perhatian dunia internasional. *Melbourne's The Age* mengutip Julie Bishop, Menteri Luar Negeri Australia yang mengatakan bahwa diplomasi koala yang Australia lakukan dalam pertemuan G20 yang diadakan di Brisbane tersebut menggambarkan Australia dengan karakteristik yang lembut, juga mempromosikan nilai-nilai Australia sebagai demokrasi yang terbuka, bebas, dan toleran,<sup>12</sup> sehingga diplomasi koala jelas tidak boleh diremehkan. Agenda diplomatik ini selanjutnya 'dikristalisasi' pada kunjungan yang dihadiri oleh sejumlah duta besar asing di Australia Barat. Selama kunjungan ke Pabrik Anggur Sandalford, hewan-hewan khas Australia dibawa dari suaka margasatwa terdekat untuk agenda istimewa, yaitu bertemu dengan para diplomat, dan koala lah yang terbukti paling disukai dan

---

<sup>11</sup> Kevin Markwell, "Koalas, platypuses and pandas and the power of soft diplomacy", *The Conversation*, diakses pada 25 Agustus 2019, <https://theconversation.com/koalas-platypuses-and-pandas-and-the-power-of-soft-diplomacy-42051>

<sup>12</sup> Ivan Plis, "Australian Diplomats Have 600-Page Koala Manual", *Daily Caller*, diakses pada 25 Agustus 2019, <https://dailycaller.com/2014/12/31/australian-diplomats-have-a-600-page-koala-manual/>

mudah untuk akrab dengan para penggemarnya. Julie Bishop mengatakan bahwa pemberian koala sebagai hadiah akan memproyeksikan kasih sayang Australia terhadap negara penerima mengingat sifat lembut dari koala.<sup>13</sup>

Berdasarkan *The Soft Power 30*, Australia menduduki peringkat ke-9 pada tahun 2019. Melalui *Foreign Policy White Paper and the Department of Foreign Affairs and Trade's (DFAT)* yang dibuat pada tahun 2017, pemerintah Australia berusaha menekankan pentingnya soft power dengan menyoroti bidang-bidang yang dapat dimaksimalkan. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan angka investasi serta minat masyarakat internasional terhadap soft power Australia tersendiri sepanjang 2018 dan 2019.<sup>14</sup> Sejalan dengan misi dari *Public Diplomacy Strategy Australia* dimana diplomasi publik ditekankan demi memperkuat pengaruh, reputasi, dan hubungan Australia secara internasional dengan mempromosikan visi yang jelas, kreatif sesuai dengan kebijakan internasional Australia yang mencerminkan kepentingan nasional Australia.<sup>15</sup>

Praktik diplomasi yang pada awalnya bersifat kaku dan konvensional, berubah setelah adanya istilah *old and new diplomacy*<sup>16</sup>, diplomasi tidak lagi berpusat pada

---

<sup>13</sup> Tom Arup, "The rise and influence of koala diplomacy", *The Sydney Morning Herald*, diakses pada 21 Agustus 2019, <https://www.smh.com.au/politics/federal/the-rise-and-influence-of-koala-diplomacy-20141224-12dj2b.html>

<sup>14</sup> "2019 Australia's Overview", *The Soft Power 30*, diakses pada 27 Maret 2020, <https://softpower30.com/country/australia/>

<sup>15</sup> "Public Diplomacy", *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*, diakses pada 26 Maret 2020, dikutip dari <https://www.dfat.gov.au/people-to-people/public-diplomacy/Pages/public-diplomacy-strategy>

<sup>16</sup> Andre Geraud, "Diplomacy, Old and New", *Foreign Affairs*, diakses pada 25 Juni 2020, <https://www.foreignaffairs.com/articles/1945-01-01/diplomacy-old-and-new>

kepala negara dengan sifat yang kaku dan rahasia, penyampaian informasi tidak lagi bersifat *government to government* (G2G), tetapi juga turut melibatkan publik suatu negara maupun internasional, dimana penyampaian informasi tersebut menjadi *government to people* (G2P). *Old diplomacy* dapat diamati selama Perang Dunia Pertama, di mana diplomat dan aktor politik berpartisipasi untuk melayani kepentingan mereka sendiri terlepas dari kepentingan publik.<sup>17</sup> Semua agenda yang dibahas di bawah *old diplomacy* lebih sempit dibandingkan dengan periode sekarang.

Pada *new diplomacy*, Ada transisi yang ditandai oleh perpindahan privasi ke keterbukaan dan transparansi. diplomasi baru dapat digeneralisasi sebagai forum yang transparan dan terbuka di mana masalah-masalah hubungan internasional dibagikan kepada publik.<sup>18</sup> Pelaksanaan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi adanya dominasi-dominasi dari aktor seperti NGO, maupun medium lain seperti pelaksanaan diplomasi budaya, diplomasi kuliner, hingga jenis olahraga seperti *ping pong diplomacy*.<sup>19</sup> *New diplomacy* memunculkan fenomena diplomasi menggunakan satwa seperti apa yang Australia lakukan, sedangkan semasa *old diplomacy*, belum ada yang terpikirkan untuk mengirimkan satwa nasional sebagai medium dalam menjalankan diplomasi suatu negara. Diplomasi publik merupakan satu dari strategi dalam melakukan diplomasi. Diplomasi dengan menggunakan koala sebagai medium

---

<sup>17</sup> Andre Geraud, "Diplomacy, Old and New", Foreign Affairs, diakses pada 25 Juni 2020, <https://www.foreignaffairs.com/articles/1945-01-01/diplomacy-old-and-new>

<sup>18</sup> Lora Anne Viola, "The Reinvention of Diplomacy", diakses pada 25 Juni 2020, <https://bibliothek.wzb.eu/artikel/2008/f-14290.pdf>

<sup>19</sup> Cosmina Ioana Codrean, Diplomacy, A Brief Analysis of The Types of Diplomacy (2017), hlm 279-280

dalam pelaksanaannya merupakan suatu sarana yang tepat dengan tujuan Australia untuk mencapai kepentingannya seperti mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain, meningkatkan keuntungan ekonomi dan pariwisata, melancarkan negosiasi dengan negara-negara, hingga menarik perhatian serta opini positif dari masyarakat internasional. Menjadi suatu hal yang menarik ketika agenda diplomasi publik ini hanya dapat dilakukan oleh Australia dan tidak ada negara lain yang bisa menjalankan diplomasi publik semacam ini. Selain itu, koala selalu identik dan digunakan sebagai salah satu lambang dari Australia.

Koala merupakan hewan asli yang pertama kali berevolusi di benua Australia, terpisah dari daratan Antartika sekitar 45 juta tahun yang lalu. Sisa-sisa fosil binatang seperti Koala telah ditemukan sejak 25 juta tahun yang lalu.<sup>20</sup> Menarik ketika seekor koala, suatu budaya dan salah satu lambang nasional, dapat digunakan sebagai instrumen diplomasi dari pemenuhan kepentingan. Tidak banyak negara yang memiliki lambang nasional yang dapat digunakan sebagai instrumen diplomasi untuk menarik perhatian masyarakat internasional. Di latar belakang penjelasan ini, penelitian ini difokuskan pada diplomasi koala yang telah dilaksanakan dengan negara-negara mitra utama Australia yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura.<sup>21</sup> Agenda diplomasi ini

---

<sup>20</sup> “History of Koalas”, *Australian Koala Foundation*, diakses pada 27 Agustus 2019, <https://www.savethekoala.com/about-koalas/history-koalas>

<sup>21</sup> Daniel Workman, “Australia’s Top Trading Partners”, *World Top Exports*, diakses pada 13 Mei 2020, <http://www.worldstopexports.com/australias-top-import-partners/>

telah dikenal luas oleh masyarakat internasional sejak pertemuan G20 di Brisbane pada November 2014.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Dengan seluruh keunikan dan bentuk diplomasi yang non-konvensional, diplomasi koala dapat berperan dalam hubungan Australia dengan mitra-mitra yang menjadi penting bagi Australia untuk membangun maupun mempertahankan hubungan baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada praktik diplomasi koala (*koala diplomacy*) sebagai bentuk diplomasi publik dari Australia dengan rentang waktu 1976-2015. Negara-negara yang menjadi tujuan pengiriman koala seperti Amerika Serikat (1976) Jepang (1984 dan 2013) dan Singapura (2015) merupakan mitra utama yang memiliki kerja sama yang sangat penting bagi Australia, dimana kerjasama tersebut menjadi satu sarana bagi Australia untuk berperan aktif serta untuk tetap berhubungan baik dengan banyak negara.<sup>22</sup> Australia sudah meresmikan koala sebagai medium dari pelaksanaan diplomatik, dimana koala menggambarkan karakteristik yang lembut, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang terbuka, bebas, dan toleran yang dimiliki Australia.<sup>23</sup> Menarik ketika agenda diplomasi koala ini hanya

---

<sup>22</sup> Daniel Workman, "Australia's Top Trading Partners", *World Top Exports*, diakses pada 13 Mei 2020, <http://www.worldstopexports.com/australias-top-import-partners/>

<sup>23</sup> Ivan Plis, "Australian Diplomats Have 600-Page Koala Manual", *Daily Caller*, diakses pada 25 Agustus 2019, <https://dailycaller.com/2014/12/31/australian-diplomats-have-a-600-page-koala-manual/>

dapat dilakukan oleh Australia, dimana koala merupakan hewan yang pertama kali berevolusi di benua Australia sejak 45 juta tahun yang lalu.<sup>24</sup>

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan dan menjadi fokus daripada penelitian ini, maka pertanyaan riset penelitian ini adalah **“Bagaimana Upaya Australia Melalui Diplomasi Koala untuk Membantu Mewujudkan Kepentingan Nasional dalam Mempertahankan Citra Baik Australia?”**

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya diplomasi koala sebagai instrumen pendukung pencapaian kepentingan politik serta hubungan diplomatik Australia dengan negara-negara studi kasus. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperlihatkan proses penerapan diplomasi koala yang turut berkontribusi terhadap kepentingan politik dan hubungan diplomatik Australia di Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura.

---

<sup>24</sup> “History of Koalas”, Australian Koala Foundation, diakses pada 3 April 2020, <https://www.savethekoala.com/about-koalas/history-koalas>



### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Mampu melengkapi penelitian lain terkait dengan Diplomasi Koala dan diplomasi publik Australia,
2. Mendorong negara dan berbagai aktor untuk memanfaatkan kebudayaannya sebagai alternatif pencapaian kepentingannya,
3. Mampu menjadi sumber ataupun referensi bagi penelitian lain yang sejenis dengan Diplomasi Koala atau diplomasi publik Australia, dan memperlihatkan keunikan Australia dalam mencapai tujuan melalui sarana diplomasi publik yaitu Diplomasi Koala.

### **1.4. Kajian Pustaka**

Penulis menggunakan tiga sumber dalam bentuk buku dan artikel jurnal yang dijadikan pedoman penelitian bagi penulis. Sumber pertama adalah artikel yang berjudul “*Constain on Indonesian and Australian Soft Power*” yang ditulis oleh Murray Green dalam *The Routledge Handbook of Soft Power* yang diterbitkan pada tahun 2016. Artikel ini berisi tentang *soft power* yang disebarkan oleh Australia-Indonesia. Diawali dengan penjelasan mengenai dua pilar Australia yaitu demokrasi dan liberal, hingga penjelasan mengenai hard power dan soft power yang Australia lakukan merupakan upaya negara untuk mendukung serta mempertahankan nilai-nilai

dan kepercayaan yang ada. Artikel ini juga menyatakan bahwa soft power disini merupakan praktek ‘tarik-menarik’, khususnya bertujuan kepada budaya dan bangsa yang ini dipengaruhi oleh Australia.<sup>25</sup>

Artikel yang kedua adalah artikel jurnal yang berjudul “*Beastly Diplomacy*”, yang ditulis oleh Halvard Leira dan Iver B. Neumann dalam *The Hague Journal of Diplomacy* yang diterbitkan pada tahun 2017. Hewan mempunyai peran penting dalam diplomasi dengan dapat mempererat hubungan antara entitas politik dan telah ditetapkan secara bertahap selama 15 hingga 20 tahun terakhir. Latar belakang sejarah yang beraneka ragam membuat hewan-hewan yang menjadi ikon nasional telah memiliki pengaruh diplomatik di luar lingkup diplomasi publik modern. Artikel ini juga memaparkan beberapa peran serta aspek dari hewan-hewan yang digunakan dalam berdiplomasi, salah satunya adalah peran hewan sebagai tujuan simbolik. Hewan dapat menjadi simbol negara, seperti panda yang mewakili Cina.<sup>26</sup>

Artikel yang terakhir adalah artikel yang berjudul “*Platypus diplomacy: animal gifts in international relations*” yang ditulis oleh Nancy Cushing dan Kevin Markell dalam *Journal of Australian Studies Vol. 33, No.3* yang diterbitkan pada tahun 2009. Artikel ini membahas platipus sebagai salah satu hewan yang dianggap sebagai instrumen diplomasi Australia, dimana hewan merupakan salah satu identitas budaya

---

<sup>25</sup> Murray Green, “Constain on Indonesian and Australian Soft Power”, diakses pada 3 September 2019, <https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315671185.ch36>

<sup>26</sup> Halvard Leira, “Beastly Diplomacy, *The Hague Journal of Diplomacy*, diakses pada 3 September 2019, [https://www.researchgate.net/publication/318685784\\_Beastly\\_Diplomacy](https://www.researchgate.net/publication/318685784_Beastly_Diplomacy)

yang tinggi dan melekat. Karenanya, hewan yang mencerminkan negara tidak jarang digunakan sebagai hadiah seremonial, atau bahkan sebagai simbol aliansi atau persahabatan antarnegara. Menurut penulis, pada tahun 1943 dan 1947 Australia mulai menggunakan hewan khasnya dalam agenda diplomatik, menggunakan salah satu spesies ikonik Australia yaitu platipus. Australia mempunyai berbagai hewan unik untuk diikutsertakan dalam agenda diplomatiknya. Platipus, kala itu dianggap sebagai hewan dari kelompok fauna yang paling aneh, yang juga dinobatkan sebagai ‘Most Wonderful of All Living Mammals’ dalam New York Zoological Society tahun 1950-an.<sup>27</sup>

Dari ketiga jurnal yang sudah dipaparkan, penulis setuju dengan pendapat dan pandangan dari masing-masing penulis yang sudah di paparkan di atas. Diplomasi publik merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mencapai kepentingan nasional. Diplomasi publik tentu tidak hanya mempengaruhi pemerintah negara tujuan, tetapi juga mempengaruhi opini masyarakat negara tersebut. Negara menggunakan hewan atau spesies sebagai representasi kekhasan nasional. Berbeda dengan diplomasi konvensional yang dilakukan antara perwakilan negara yang terakreditasi, diplomasi publik ditujukan pada masyarakat internasional dan bertujuan untuk membentuk citra yang diinginkan. Sama halnya dengan *platypus diplomacy* yang dijelaskan pada artikel ketiga, kegiatan *koala diplomacy* yang menjadi topik dalam penelitian ini juga menjadi

---

<sup>27</sup> Nancy Cushing, “Platypus diplomacy: animal gifts in international relations”, *Journal of Australian Studies*, diakses pada 4 September 2019, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14443050903079664>.

simbol dari Australia. Koala yang dianggap mewakili karakteristik Australia yang hangat, terbuka, serta bersahabat. Diplomasi hewan, melalui diplomasi koala turut berkontribusi dalam pembaharuan praktik diplomasi publik.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Setiap negara memiliki kebijakan luar negeri yang digunakan demi mencapai kepentingannya dalam berurusan dengan dunia internasional. Kebijakan Luar Negeri (KLN) dapat dipandang sebagai tiga hal, yakni kumpulan orientasi suatu negara, bentuk perilaku suatu negara dalam hubungan internasional, serta rencana aksi dan komitmen suatu negara.<sup>28</sup> KLN dianggap sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Perkembangan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan atau perilaku negara lain atau rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu. Diplomasi merupakan salah satu alat kebijakan luar negeri.<sup>29</sup> Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.<sup>30</sup>

Aspek kebudayaan dan sejarah turut berperan dalam latar belakang terbentuknya suatu KLN. Nilai suatu negara mampu dibagikan kepada masyarakat luas

---

<sup>28</sup> James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction* (New York: Simon & Schuster, 1976), hlm 16

<sup>29</sup> Britanica, "*Foreign Policy*", diakses pada 3 Maret 2019, <https://www.britannica.com/topic/foreign-policy>

<sup>30</sup> Jemadu. Aleksius, *Politik Global dalam Teori & Praktik* (2008), hlm 65

hingga berpengaruh pada formulasi KLN dan implementasinya dalam hubungan antar negara. Semakin masyarakat tersatukan oleh budaya dan sejarah yang ada, semakin jelas dan tegas *national interest* yang hendak dicapai. Aspek budaya mampu membuat perilaku kebijakan luar negeri semakin efektif. Pengaruh budaya juga tidak hanya berdampak pada masyarakat, melainkan juga pada proses KLN, dimana nilai yang sudah ada di suatu negara membantu membentuk ataupun mendukung aktivitas negara yang ditujukan bagi negara lain.<sup>31</sup>

Kepentingan nasional adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya.<sup>32</sup> Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Sejak berakhirnya era Perang Dingin pada tahun 1989-an, era baru telah memunculkan adanya kemungkinan akan kekuasaan aktor non-negara, yaitu manusia secara individu maupun kolektif komunitas atau institusi swasta sebagai pemberi legitimasi kebijakan negara. Kepentingan nasional negara yang bersifat kaku dan agresif tergantikan dengan kepentingan yang bersifat persuasif non-destruktif (*soft power*). *Soft power* berhasil memunculkan ragam diplomasi yang memberdayakan publik individu ke dalam ragam

---

<sup>31</sup> James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction* (New York: Simon & Schuster, 1976), hlm 20

<sup>32</sup> Intermestic: Journal of International Studies, Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional (2018), hlm 109

bentuk persuasif yang menarik secara populer pada tingkat non-negara dan subnegara.<sup>33</sup>

Diplomasi digunakan sebagai jalan atau penghubung hubungan antar negara selain berperang. Pada prinsipnya, diplomasi sangat berkaitan erat dalam pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara<sup>34</sup>. Diplomasi merupakan instrumen bagi negara untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Diplomasi adalah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi yang menjunjung perdamaian dalam berhubungan dengan negara lain.<sup>35</sup> Untuk mencapai kepentingan nasional, dibutuhkan keterampilan dalam berdiplomasi dalam tiap-tiap diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah jika tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi bertujuan untuk memperkuat negara, bangsa, atau organisasi dalam hubungannya dengan orang lain dengan memajukan kepentingan-kepentingan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>36</sup>

Diplomasi telah mengalami perubahan, sebagai dampak dari Perang Dingin, dimana mulai adanya istilah *old and new diplomacy*.<sup>37</sup> Adanya dukungan dari berbagai

---

<sup>33</sup> Intermestic: Journal of International Studies, Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional (2018), hlm 110

<sup>34</sup> Agung Indrawati, "Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim", diakses pada 10 September 2019, <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/1462/589>

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Chas. W. Freeman dan Sally Marks, "Diplomacy", *Britannica*, 17 Januari 2019, diakses pada 10 September 2019, <https://www.britannica.com/topic/diplomacy>

<sup>37</sup> *Ibid.*

faktor, seperti masuknya ideologi, serta transformasi konsep diplomasi tersendiri, dari yang tertutup di kalangan elit menjadi sesuatu yang sangat terbuka dan melibatkan banyak orang.<sup>38</sup> Selain adanya revolusi teknologi informasi yang menuntut perubahan dalam praktik diplomasi, perubahan-perubahan lain yang terjadi adalah meningkatnya peran media massa, meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam kegiatan hubungan internasional, adanya alat atau medium unik yang digunakan pemerintah suatu negara, dan masalah-masalah kompleks yang menghapus batasan nasional suatu negara.<sup>39</sup>

Pada *old diplomacy*, para diplomat dan aktor politik dianggap sebagai bagian paling ‘gelap’ dari negara karena mereka terlibat dalam urusan internasional yang menimbulkan bahaya dan ancaman bagi keamanan nasional mereka. Selain dari dilakukan secara tertutup, dan bersifat rahasia, agenda yang dibahas pada *old diplomacy* lebih sempit dan dibatasi.<sup>40</sup>

Sedangkan pada *new diplomacy*, tidak lagi berpusat pada kepala negara dengan sifat yang kaku dan rahasia, tetapi mulai adanya dominasi dari aktor maupun instrumen lain. Ada transisi yang ditandai oleh keterbukaan dan transparansi. *New diplomacy* dapat digeneralisasi sebagai forum yang transparan dan terbuka di mana masalah-masalah hubungan internasional dibagikan kepada publik. *New diplomacy*

---

<sup>38</sup> R. P. Barston, *Modern Diplomacy* (London: Routledge, 2014), hlm 2

<sup>39</sup> Barry Fulton, *Reinventing Diplomacy*, hlm 8

<sup>40</sup> Andre Geraud, “Diplomacy, Old and New”, *Foreign Affairs*, diakses pada 25 Juni 2020, <https://www.foreignaffairs.com/articles/1945-01-01/diplomacy-old-and-new>

menganjurkan perdamaian, dan menentang penggunaan militer untuk menyelesaikan konflik.<sup>41</sup>

Dominasi negara yang berkurang dalam aktivitas diplomasi ini memunculkan adanya konsep *multitrack diplomacy*. Konsep diplomasi multi jalur atau *multitrack diplomacy* mempunyai sembilan jalur yang melibatkan elemen masyarakat. Hubungan masyarakat internasional yang baik, sekaligus sebagai kontrol terhadap pemerintah dianggap memerlukan campur tangan dari para aktor diplomasi non negara. Konsep *multitrack diplomacy* berbicara mengenai penempatan aktor-aktor non-negara yang dianggap berpengaruh terhadap proses diplomasi. Masing-masing jalur, memiliki peran dan karakteristik tersendiri.<sup>42</sup>

Diantara berbagai bentuk diplomasi baru yang muncul dan berkaitan dengan diplomasi multijalur, terdapat satu bentuk diplomasi yang menjadi sorotan utama masyarakat internasional, yaitu diplomasi publik, yang perkembangannya dipicu oleh kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur pertama atau *first track diplomacy* dianggap telah gagal mengatasi konflik-konflik antar negara.<sup>43</sup> Sejak masa Perang Dingin, diplomasi publik sudah mulai diperkenalkan kepada dunia. Diplomasi publik menurut Nicholas J. Cull adalah upaya aktor

---

<sup>41</sup> Lora Anne Viola, "The Reinvention of Diplomacy", diakses pada 25 Juni 2020, <https://bibliothek.wzb.eu/artikel/2008/f-14290.pdf>

<sup>42</sup> John Mcdonald, "What is Multi-track diplomacy", *Institute Multi-Track Diplomacy*, diakses pada 11 September 2019, <http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/>

<sup>43</sup> John. Mc Donald, Further Exploration of Track Two Diplomacy, in Louis Kreisberg and Stuart J. Thorson (Eds), *Timing the De-Escalation of International Conflict*, Syracuse University Press 1991, hlm 201-220



internasional untuk mengupayakan kebijakan luar negerinya dengan melibatkan publik asing. Selain itu, Cull menekankan bahwa diplomasi publik secara tradisional dianggap sebagai kontak pemerintah ke publik.<sup>44</sup> Aktor dalam diplomasi publik menjadi lebih beragam, tidak hanya negara namun aktor non-negara juga dapat mengambil peran dalam diplomasi publik. Beberapa aktor non negara yang dapat mengambil peran dalam kegiatan diplomasi publik yaitu *International Organization* (OI), *Non-governmental Organization* (NGO), *Multinational Corporation* (MNC) dan individu. Menurut Cull, diplomasi publik memiliki lima komponen penting yaitu *listening*, *advocacy*, *cultural diplomacy*, *transfer diplomacy* dan *international broadcasting*. *Listening* merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam diplomasi publik karena cara ini merupakan proses pengumpulan data mengenai opini negara lain terhadap suatu negara. Kemudian akan dijadikan salah satu bagian yang menjadi patokan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik selanjutnya.<sup>45</sup>

Alan K. Henrikson mengemukakan lima bentuk pencapaian dari diplomasi publik, yaitu diantaranya *containment*, *penetration*, *transformation*, *enlargement* dan *consolidation*. Diantara kelima bentuk pencapaian tersebut, dua diantaranya merupakan pencapaian yang paling relevan dengan penelitian ini, yaitu *enlargement* dan *consolidation*. *Enlargement* adalah upaya negara untuk melakukan penyebaran

---

<sup>44</sup> Atsushi Tago, "Public Diplomacy and Foreign Policy", Oxford Research Encyclopedia of Politics (2017): 3, diakses pada 28 Januari 2020, <http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-471?print=pdf>

<sup>45</sup> Nichollas J. Cull, *Public Diplomacy: Lesson From the Past* (Los Angeles: Figueroa Press, 2009), 18

norma dan kepentingan nasional suatu negara melalui cara yang damai, dimana tidak memaksa dan tidak menggunakan kekerasan. Penerapan dari *enlargement* bersifat jangka panjang. Kemudian *consolidation*, yang merupakan proses untuk meningkatkan pemahaman dari negara lain. Beberapa hal yang dilakukan yaitu seperti menanamkan ide dan nilai-nilai kepada masyarakat internasional. Tujuannya untuk mempercepat atau menjaga hubungan baik antar negara. Hal ini bisa dilakukan kepada masyarakat domestik maupun pada masyarakat asing. Kegiatan ini bisa dilakukan tidak hanya melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, namun juga melalui organisasi serta forum internasional.<sup>46</sup>

Menurut Joseph Nye, diplomasi publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya guna berkomunikasi dengan dan menarik publik dari negara lain.<sup>47</sup> Selain bertujuan untuk menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Dalam teorinya, Nye melengkapi penjelasan mengenai diplomasi publik dengan tiga dimensi. Pada dimensi ketiga, ia menjelaskan bahwa diplomasi publik juga bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan individu-individu penting melalui program-program yang dijalankan oleh suatu negara.<sup>48</sup> Diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antar budaya terkait dengan persoalan-persoalan politik luar

---

<sup>46</sup> Alan K. Henrikson, What Can Public Diplomacy Achieve?, ed. Dominic Kelly, Discussion paper in Diplomacy, diakses pada 6 April 2020, <https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/publicdiplo.pdf>

<sup>47</sup> Joseph S. Nye, Public Diplomacy and Soft Power, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*;616. (2008), hlm. 1

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 94

negeri. Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah.<sup>49</sup>

Sejak tahun 1980-an diperkenalkan istilah soft power dalam konsep diplomasi, politik, dan kajian akademik. Istilah ini mengacu pada kemampuan negara untuk mencapai kepentingannya dengan cara yang persuasif dan menarik untuk menggantikan praktik-praktik diplomasi yang mengandung unsur kekerasan dan bersifat kaku seperti intervensi militer atau embargo ekonomi. Aktivitas diplomasi ini memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “masyarakat epistemik”.<sup>50</sup>

Beberapa teori dan konsep di atas digunakan sebagai alat bantu dalam menjawab pertanyaan yang menjadi *research question* dalam penelitian ini. Koala dan karakteristiknya merupakan objek yang digunakan untuk melambangkan nilai-nilai yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh Australia. Selain itu, hewan yang menghabiskan hampir seluruh waktu dalam hidupnya untuk tidur pun digunakan sebagai salah satu simbol negara, dimana dengan adanya simbolisme berupaya untuk mengobjektifikasi suatu negara secara bermakna.<sup>51</sup> Selain dari sifat dan karakteristik koala yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, koala digambarkan sebagai ikon fauna Australia, spesies penting internasional, hingga simbol budaya Australia.

---

<sup>49</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori & Praktik* (2007), hlm 191

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 209

<sup>51</sup> Pacher Andreas, “The ritual creation of political symbol: International exchanges in public diplomacy”, *The British Journal of Politics and International Relations*, 2018, hlm 880

Citra koala telah merasuki warisan budaya Australia selama hampir seabad. *Blinky Bill* yang dibuat oleh Dorothy Wall, serta *The Magic Pudding* yang dibuat oleh Norman Lindsay merupakan buku anak-anak klasik Australia yang menceritakan koala sebagai pemeran utama menggambarkan simbol signifikansi koala bagi identitas nasional Australia.<sup>52</sup>

Dengan adanya simbol-simbol dalam kegiatan diplomasi, memungkinkan masyarakat luas melihat negara sebagai kesatuan entitas yang nyata, bukan hanya sebagai sesuatu yang abstrak nilainya. Dengan adanya simbol, negara dapat dilihat sebagai aktor yang memiliki identitas, nilai, dan kepentingan tertentu. Sehingga ketika masyarakat internasional mampu memahami negara dalam bentuk demikian, mereka dapat melibatkan emosi serta membayangkan “kualitas manusia” didalamnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> “The Koala-saving our national icon”, Parliament of Australia, diakses pada 20 Juli 2020, [https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Committees/Senate/Environment\\_and\\_Communications/Completed\\_inquiries/2010-13/koalas/report/index](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/Completed_inquiries/2010-13/koalas/report/index)

<sup>53</sup> Alisher Faizullaev, “Diplomacy and Symbolism”, dalam *The Hague Journal of Diplomacy* 8, (Martinus Nijhoff, 2013), hlm 92-93

## Skema Teori



Dari bagan yang ada di atas, dapat dijelaskan bahwa:

Kebijakan Luar Negeri merupakan kumpulan orientasi suatu negara, bentuk perilaku suatu negara dalam hubungan internasional, serta rencana aksi dan komitmen suatu negara. KLN juga dianggap sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal.<sup>54</sup> Panah berwarna hitam menunjukkan hubungan antara teori KLN dengan teori diplomasi, dimana diplomasi merupakan salah satu instrumen penting yang dilakukan oleh negara dalam melakukan kebijakan luar negerinya.<sup>55</sup> Tujuan diplomasi adalah untuk memperkuat negara, bangsa, atau organisasi dalam hubungannya dengan orang lain dengan memajukan kepentingan-kepentingan yang

---

<sup>54</sup> James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction* (New York: Simon & Schuster, 1976), hlm 16

<sup>55</sup> Britanica, “*Foreign Policy*”, diakses pada 3 Maret 2019, <https://www.britannica.com/topic/foreign-policy>

menjadi tanggung jawabnya.<sup>56</sup> Panah selanjutnya menunjukkan hubungan antara teori diplomasi dengan diplomasi publik, karena diantara berbagai bentuk diplomasi baru yang muncul dan berkaitan dengan diplomasi multijalur, terdapat diplomasi publik. Diplomasi publik merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh negara, asosiasi negara, dan beberapa aktor sub-negara dan non-negara untuk memahami budaya, sikap dan perilaku, membangun dan mengelola hubungan juga mempengaruhi pikiran serta memobilisasi tindakan untuk memajukan minat dan nilai-nilai mereka. Ditandai dengan proses *top-down*, Diplomasi Publik merupakan salah satu bentuk implementasi *soft power* suatu negara.<sup>57</sup>

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi suatu fenomena yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.<sup>58</sup> Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami (*to understand*) dan menafsirkan (*to interpret*)

---

<sup>56</sup> Chas. W. Freeman dan Sally Marks, "Diplomacy", *Britannica*, 17 Januari 2019, diakses pada 16 Februari 2019, <https://www.britannica.com/topic/diplomacy>

<sup>57</sup> Atsushi Tago, "Public Diplomacy and Foreign Policy", *Oxford Research Encyclopedia of Politics* (2017): 3, diakses pada 16 Februari 2019, <http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-471?print=pdf>

<sup>58</sup> John W. Creswell, (2013), *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications) hal 13-14

sebuah perilaku atau interaksi sosial.<sup>59</sup> Menggunakan Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura sebagai negara studi kasus, dimana studi kasus merupakan metode untuk menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau situasi tertentu terjadi.<sup>60</sup> Selain dari ketiga negara tersebut merupakan negara penerima koala hingga saat ini, AS, Jepang, dan Singapura merupakan mitra utama yang memiliki kerja sama yang sangat penting bagi Australia.<sup>61</sup> Amerika Serikat merupakan mitra investasi terbesar Australia<sup>62</sup>, Jepang sebagai mitra investasi terbesar kedua Australia<sup>63</sup>, dan Singapura yang merupakan pasar pariwisata *inbound* terbesar kelima di Australia<sup>64</sup>.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui data sekunder atau studi literatur dan kepustakaan. Dalam studi literatur, penulis akan menggunakan buku, artikel dalam jurnal dan artikel berita elektronik melalui internet mengenai informasi serta data-data yang terkait dengan Diplomasi Koala Australia.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 14-19

<sup>60</sup> Hodgetts, D. J., & Stolte, O. M. E. (2012). Case-based research in community and social psychology: Introduction to the special issue. *Journal of Community & Applied Social Psychology*

<sup>61</sup> Daniel Workman, "Australia's Top Trading Partners", *World Top Exports*, diakses pada 13 Mei 2020, <http://www.worldstopexports.com/australias-top-import-partners/>

<sup>62</sup> "Australia and the United States Relations", *Australia in the USA*, diakses pada 19 April 2020, <https://usa.embassy.gov.au/australia-and-us-relations>

<sup>63</sup> "Australia-Japan bilateral relationship", Department of Foreign Affairs and Trade, diakses pada 19 April 2020, <https://www.dfat.gov.au/geo/japan/Pages/australia-japan-bilateral-relationship>

<sup>64</sup> "Singapore Country Brief", Department of Foreign Affairs and Trade, diakses pada 22 April 2020, <https://www.dfat.gov.au/geo/singapore/Pages/singapore-country-brief>

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan dibagi kepada empat bab. Bab I berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II akan dibuka dengan penjelasan *profile* negara Australia secara umum seperti latar belakang, bentuk diplomasi yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan luar negerinya, dan diplomasi publik dan soft power bagi Australia. Kemudian dilanjutkan dengan Hubungan Australia dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura.

Bab III akan menganalisis bagaimana proses diplomasi koala yang Australia jalankan dengan Amerika Serikat, Jepang, serta Singapura berdasarkan teori yang digunakan dalam kerangka pemikiran.

Bab IV adalah kesimpulan.



